

Jurnal Pijar
Studi Manajemen dan Bisnis

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/pmb>

Vol. 3 No. 3, 2025, Hal. 336 - 343

ISSN 2963-0606 (Online)

ISSN 2964-9749 (Print)

**PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
(STUDI KASUS PADA RSUD KABUPATEN MUNA BARAT)**

Sitti Hadijah¹, Wa Ode Ade Nurfaida², Nur Juliana³, Wahidah Rohmawati⁴
Fakultas Vokasi, Universitas Karya Persada Muna, Raha

Abstrak

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan rumah sakit menuntut manajemen rumah sakit untuk mengoperasikan rumah sakit secara profesional, termasuk dalam hal akuntabilitas keuangan. Penerapan transparansi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan di RSUD Kabupaten Muna Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melakukan perencanaan anggaran dengan melibatkan berbagai bagian dan unit dalam proses perencanaan anggaran. Proses pengawasan dan pengendalian keuangan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Audit keuangan oleh pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah salah satu upaya untuk menjamin transparansi pengelolaan keuangan. Dari sisi aksesibilitas publik terhadap informasi keuangan melalui laporan keuangan, diketahui bahwa belum ada media online seperti situs yang menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik. Dari hasil penelitian ini, disarankan kepada pihak rumah sakit untuk mempertimbangkan pengembangan dan perbaikan kebijakan khususnya mengenai publikasi informasi keuangan, termasuk strategi untuk mempublikasikan laporan keuangan melalui situs rumah sakit untuk menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap rumah sakit.

Kata Kunci: Manajemen keuangan, tata kelola keuangan, rumah sakit, transparansi

Abstract

The increasing public demand for health services provided by hospitals requires hospital management to operate hospitals professionally, including in terms of financial accountability. The implementation of transparency is expected to increase accountability and the level of public trust in hospitals. This study aims to provide an overview of applying the principle of transparency in financial management at the West Muna Regency Hospital. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results showed that budget planning was carried out by involving various sections and units in the budget planning process. The process of financial supervision and control involves various parties. Financial audits by external parties such as the Supreme Audit Agency (BPK) are an effort to ensure transparency in financial management. In terms of public accessibility to financial information through financial reports, it is known that there is no online media such as sites that provide financial reports that can be accessed by the public. It is recommended the hospital consider developing and improving policies, especially regarding the publication of financial information, including strategies to publish financial reports through the hospital website to maintain the level of public trust in the hospital.

Keywords: *Financial management, financial governance, hospital, transparency*

Alamat Korespondensi
Jl. Gambas, Kel.Sidodadi, Kec.Batalaiworu, Kab.Muna
E-mail: shadijah.lc.id@gmail.com

Pendahuluan

Rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan salah satu institusi pelayanan publik yang perlu untuk menerapkan transparansi dalam pengelolaannya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Transparansi merupakan upaya penyediaan semua informasi yang mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif secara akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya (Maulana dan Lubis, 2020). Transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan *good governance* yang bertujuan untuk mengurangi kegiatan yang dapat merugikan masyarakat.

Transparansi dalam sebuah organisasi berkaitan dengan upaya organisasi untuk membuka diri kepada pihak eksternal atas proses internal dan keputusan organisasi terlepas dari keterlibatan pihak eksternal dalam organisasi (Sagala, 2020). Menurut Herlianto dalam Hidayat *et al.*, (2022) adanya transparansi akan memudahkan publik untuk memperoleh informasi yang faktual dan aktual sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk membandingkan rencana program dengan kinerja keuangan, menilai ada-tidaknya tindak korupsi dalam perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, dan untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam menerapkan transparansi diperlukan media untuk menyampaikan informasi karena media berperan sebagai penghubung yang memungkinkan informasi dapat diakses oleh publik. Laporan keuangan merupakan salah satu media yang dapat digunakan oleh pengelola keuangan dalam mengaplikasikan konsep transparansi tersebut. Aksesibilitas laporan keuangan bagi pengguna di situs web merupakan salah satu aspek penting dalam transparansi (Kusumaningtyas, *et.al.*, 2023).

Beberapa penelitian terkait transparansi pada institusi kesehatan pernah dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tompo *et al.*, (2021) yang menemukan bahwa transparansi belum terlaksana sepenuhnya di RSUD Lanto Daeng Pasewang karena belum adanya sistem informasi terkait transparansi anggaran yang dapat diakses bebas oleh Masyarakat. Sulfiani (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa transparansi yang dilakukan oleh pihak Kantor Cabang Kota Palopo mengenai dana administrasi sudah cukup baik karena informasi mengenai denda keterlambatan pembayaran iuran sudah tercantum dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh pihak BPJS Kesehatan. Penelitian Wongkar *et al.*, (2024), menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah. Semakin tinggi akuntabilitas yang diterapkan, semakin baik kinerja pemerintah. Kinerja meningkat ketika pengelolaan keuangan daerah lebih transparan.

RSUD Muna Barat merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang ada di Sulawesi Tenggara. Survei awal menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menerapkan prinsip transparansi, masih ada kesenjangan antara kebijakan dan praktiknya. Beberapa yang ditemukan bahwa laporan keuangan belum dapat diakses oleh publik secara optimal. Selain itu, media yang ada belum digunakan secara optimal untuk memberikan informasi pengelolaan keuangan RSUD kepada masyarakat. Signifikansi penelitian yaitu penguatan tata kelola keuangan rumah sakit dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Kebaruan penelitian melalui pendekatan integratif antara kepatuhan regulasi dan persepsi terhadap transparansi pengelolaan keuangan di RSUD. Olehnya itu, sebagai salah satu institusi pelayanan publik, maka perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan pada RSUD Muna Barat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi perbaikan sistem pelaporan keuangan rumah sakit serta memperkaya literatur tentang transparansi keuangan di sektor kesehatan daerah.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat (Syahza, 2016). Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Kabupaten Muna Barat. Sumber data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumentasi resmi rumah sakit dan data dari beberapa instansi terkait. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi yakni : (1) pegawai yang bekerja di bagian keuangan minimal 3 (tiga) tahun; (2) bersedia menjadi informan; (3) informan dapat berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah pegawai yang tidak memiliki wawasan tentang pengelolaan keuangan dan tidak bersedia menjadi informan. Total informan dalam penelitian ini adalah 4 orang, terdiri atas 2 orang informan kunci dan 2 orang informan biasa.

Tabel 1. Data Informan

No.	Informan	Umur	Keterangan	Pendidikan Terakhir	Tipe Informan
1.	A	39	Kepala Seksi Keuangan	S1 Kesehatan Masyarakat	Informan Kunci
2.	L	49	Kepala Bidang Tata Usaha	S1 Kesehatan Masyarakat	Informan Kunci
3.	M	40	Direktur	S2 Kesehatan Masyarakat	Informan Biasa
4.	H	36	Keluarga pasien	SLTA/Sederajat	Informan Biasa

Sumber: Data Primer, 2023

Hasil dan Pembahasan

Prinsip-Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan pada RSUD

Informatif

Keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan di rumah sakit dapat dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan agar mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana publik untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit dan meminimalisir kecurigaan terhadap pengelolaan dana tersebut. Penyajian informasi yang dilakukan oleh rumah sakit tentang biaya pelayanan, tagihan, dan biaya tambahan kepada pasien dilakukan dengan cukup memadai. Sebagaimana hasil wawancara kepada informan yang menyatakan:

"Masalah-masalah, keuangan terkait dengan gaji, honor, jasanya itu jika di rumah sakit, yang berhubungan dengan haknya orang lain, itu! itu, tetap transparan, artinya disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dapat sekian, hitungannya sekian, toh!" (Informan M:12/09/2023).

"Keterbukaan dan transparansi di rumah sakit dalam menyajikan informasi tentang biaya pelayanan tagihan, biaya lainnya itu sudah lebih dari cukup terbuka. Karena... sudah diinformasikan sebelumnya oleh petugas di rumah sakit, untuk... melakukan tindakan pelayanan dan perawatan di UGD" (Informan H: 29/09/2023).

"Menurut saya itu sangat penting keterbukaan dan transparansi itu... sangat penting karena kita akan merasa lebih percaya terhadap rumah sakit, jika kita dapat melihat bagaimana dana publik digunakan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut" (Informan H: 29/09/2023)."

Pernyataan ini menunjukkan pentingnya transparansi keuangan rumah sakit, terutama dalam hal hak-hak pasien dan tenaga medis. Agar tidak ada kesalahpahaman, pihak-pihak yang berkepentingan disampaikan secara terbuka tentang masalah keuangan seperti gaji, honor, atau biaya layanan, termasuk perhitungan detailnya. Sementara itu, rumah sakit cukup transparan dalam memberikan informasi tentang biaya pelayanan, terutama di UGD, sehingga pasien dapat memahami bagaimana dana dialokasikan sebelum mereka menerima tindakan medis. Selain itu, keterbukaan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit karena mereka melihat bagaimana dana publik digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan. Oleh karena itu, transparansi memastikan akuntabilitas keuangan dan meningkatkan hubungan antara rumah sakit, pasien, dan tenaga kesehatan. Saran untuk mempublikasikan laporan keuangan secara lebih terbuka untuk masyarakat. Hasil penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara pada informan berikut :

Saran saya dan... usulan saya di rumah sakit sebaiknya... mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat agar kita juga dapat memantau, apakah dana tersebut... sudah digunakan sesuai prosedur, dengan kebutuhan... agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kekhawatiran dana tersebut digunakan untuk apa saja di rumah sakit (Informan H:29/09/2023).

Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa laporan keuangan rumah sakit sebaiknya dipublikasikan secara publik dan mudah diakses oleh masyarakat. Tujuan publikasi ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana. Masyarakat akan dapat melihat bagaimana dana digunakan untuk memastikan dana telah digunakan dengan benar. Selain itu, diharapkan keterbukaan informasi keuangan ini akan mencegah kecurigaan atau kekhawatiran tentang kemungkinan penyalahgunaan dana. Dengan menjadi terbuka, masyarakat akan lebih percaya bahwa dana yang dialokasikan untuk rumah sakit digunakan dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pengungkapan

Pengungkapan kondisi keuangan, susunan pengurus keuangan, perencanaan keuangan, pencapaian target, dan kinerja keuangan dilakukan melalui laporan tahunan atau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sebagaimana hasil wawancara kepada informan yang menyatakan:

“Dilakukan! Pengungkapan itu, dan itu terdapat di laporan akhir, biasanya laporan tahunan, atau LPJ lah, ya... laporan pertanggungjawaban ibarat, jadi, itu dilakukan dengan pertama membuat LPJ, di dalam LPJ itu ada, eee... kondisi keuangannya kita, dan target capaiannya kita, sesuai rencana kerja. ya... sesuai renja dengan target. Jadi... setiap tahun, akhir tahun itu pasti dibuat seperti itu. Ya... jadi itu tadi, ini kan eee... pengungkapan ini berkaitan dengan transparansi tadi ya... Jadi, rumah sakit melakukan pengungkapan melalui... laporan, ee... laporan LPJ tentang capaian kinerja targetnya tercapai atau tidak, dengan anggaran yang sekian ini, sampai di mana ini pekerjaan bisa dilakukan (Informan L: 15/09/2023).”

“Ada. Kalau dalam laporan kan tidak disimpan toh? Yang... dalam laporan itu yang dimuat hanya bukti-bukti pengeluaran. Tapi kalau.. susunannya yah yang bekerja didalam, paling bendahara sama operatornya toh? Utamanya... harus ditau sama atasan toh? Setiap yang dilakukan, otomatis dilaporkan dulu sama... pimpinannya atasannya... baru kita kerjakan. Sesuai dengan rencana yang sudah ini... dianggarkan (Informan A: 12/09/2023).”

Pernyataan ini mengungkapkan bahwa kinerja dan kondisi keuangan melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan, yang mencakup kondisi keuangan, pencapaian target, dan kesesuaian dengan rencana kerja. Proses ini mencerminkan upaya transparansi, di mana LPJ menjadi alat akuntabilitas untuk mengevaluasi apakah target tercapai sesuai anggaran. Namun,

informan juga menyiratkan bahwa detail proses penyusunan LPJ seperti peran bendahara dan operator tidak sepenuhnya terungkap dalam laporan akhir, melainkan lebih bersifat internal dan hanya dilaporkan kepada atasan sebelum tindakan diambil.

Pembahasan

Transparansi adalah prinsip yang menjamin keterbukaan akses dan kebebasan bagi semua individu untuk memperoleh informasi yang akurat, aktual, dan komprehensif tentang penyelenggaraan pemerintah, termasuk kebijakan, proses pembuatan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan hasil yang dicapai. Sedangkan transparansi dalam pengelolaan keuangan rumah sakit merujuk pada prinsip yang menjamin akses terbuka dan kebebasan informasi bagi semua pemangku kepentingan terkait dengan aspek keuangan rumah sakit. Menurut Ariyanto dalam Munawar (2021) transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu: pihak pemegang kepentingan (masyarakat, karyawan, manajemen, dan pemerintah) yang memiliki hak memperoleh informasi keuangan relevan secara berkala dan teratur; proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional organisasi dilakukan oleh unit organisasi dan pegawai secara terbuka dan objektif dengan tetap menjaga kerahasiaan organisasi; tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada publik dan instansi yang berwenang secara rutin; serta terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Penelitian Ningsih *et al*, (2023) menunjukkan bahwa manajemen rumah sakit dan ukuran rumah sakit sangat mempengaruhi transparansi keuangan; namun, jenis rumah sakit dan Tingkat Hunian Tempat Tidur (BOR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan menekankan betapa pentingnya transparansi informasi, penelitian ini menambah literatur akuntansi sektor publik dengan menyarankan RSUD untuk meningkatkan praktik transparansi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan pada RSUD Kabupaten Muna Barat tercermin dari setiap proses perencanaan, pengendalian, pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan. Proses perencanaan anggaran melibatkan berbagai departemen dengan memastikan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja. Pengawasan dan pengendalian pengeluaran keuangan dilakukan secara ketat, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan melibatkan berbagai pihak. Keterbukaan dalam hasil pemeriksaan keuangan kepada pihak berkepentingan, seperti tim BPK dan Inspektorat.

Penyajian informasi terkait dengan keuangan, gaji, honor, biaya pelayanan, tagihan, dan biaya tambahan kepada pasien dan pegawai di rumah sakit telah dilakukan oleh pihak rumah sakit. Hal ini sejalan dengan penelitian Tompo *et al*, (2021) yang menyatakan bahwa semua rumah sakit baik yang dikelola oleh negara maupun yang dikelola oleh swasta harus memastikan ketersediaan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat umum sebagai pengguna jasa. Selain itu, laporan keuangan dapat diakses melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) pada akun masing-masing dari bagian keuangan. Penelitian Ekawaty *et al*, (2022) menunjukkan bahwa prinsip GCG telah diterapkan secara efektif, seperti keterbukaan informasi, kejelasan fungsi struktur organisasi, kepatuhan terhadap peraturan, kemandirian pengelolaan, dan perlakuan adil terhadap pegawai. Namun, penelitian ini juga menyarankan untuk meningkatkan evaluasi kinerja pegawai dan konsistensi dalam penerapan prinsip GCG agar pencegahan fraud dapat dilakukan dengan lebih baik.

Dalam hal pengungkapan informasi, rumah sakit melakukan pengungkapan informasi melalui laporan pertanggungjawaban, mencakup kondisi keuangan, susunan pengurus keuangan, perencanaan keuangan, dan pencapaian target kinerja yang disampaikan tepat waktu. Hidayat *et*

al, (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bentuk transparansi kepada pemerintah terkait kinerja dari rumah sakit ditunjukkan dengan tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja untuk satu periode yang telah diaudit dan dipublikasikan kepada BPK kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan di RSUD Kabupaten Muna Barat ditunjukkan dengan konsistensi dalam penyajian laporan keuangan setiap tahun melalui aplikasi keuangan yang digunakan, seperti peralihan dari SIMDA ke SIPD. Hal ini menandakan adanya upaya yang dilakukan oleh rumah sakit untuk menyajikan informasi yang jelas dan akurat. Meskipun keterbukaan dan transparansi dianggap memadai, RSUD Kabupaten Muna Barat perlu mempertimbangkan untuk mempublikasikan laporan keuangan melalui situs web atau platform *online* khusus, agar dapat diakses oleh para *stakeholder*. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga meminimalkan potensi ketidakpastian atau keraguan terkait pengelolaan dana publik.

Hasil ini menunjukkan bahwa, meskipun rumah sakit telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui LPJ, praktik pengungkapannya masih terbatas pada output, yaitu bukti pengeluaran dan capaian, tanpa mencakup proses internal yang mendasarinya. Hal ini sejalan dengan teori transparansi, yang tidak hanya menekankan pentingnya keterbukaan informasi, tetapi juga menunjukkan bahwa ada perbedaan antara mekanisme pengambilan keputusan di balik layar dan pelaporan formal. Meskipun tetap memenuhi standar akuntabilitas internal, keterlibatan pihak tertentu, seperti atasan dan bendahara, dalam penyusunan LPJ tanpa dokumentasi menyeluruh berpotensi mengurangi akuntabilitas publik.

RSUD Kabupaten Muna Barat melakukan pengungkapan informasi melalui laporan pertanggungjawaban, mencakup kondisi keuangan, susunan pengurus keuangan, perencanaan keuangan, dan pencapaian target kinerja setiap tahun. Laporan keuangan dapat diakses melalui sistem pelaporan *online* yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) pada akun masing-masing dari bagian keuangan, namun belum ada situs web yang digunakan untuk akses laporan keuangan ke publik. Rumah sakit dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih terperinci dan terstruktur terkait transparansi keuangan. Hal ini dapat mencakup strategi untuk mempublikasikan laporan keuangan secara lebih luas, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses informasi terkait keuangan rumah sakit.

Penelitian Mulyati *et al*, (2020) menunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,645, sistem pengendalian intern berkontribusi sebesar 41,6% terhadap kualitas laporan keuangan, sementara komponen lain, seperti sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah, berkontribusi sebesar 58,4% terhadap kualitas laporan keuangan. Trisnani *et al*, (2018) menemukan bahwa sistem pengendalian intern membantu meningkatkan keandalan laporan keuangan, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah perlunya standarisasi format LPJ yang mencantumkan hasil kinerja dan keuangan serta peran dan proses pengambilan keputusan masing-masing pihak. Untuk meningkatkan transparansi proses internal, rumah sakit dapat mempertimbangkan untuk menerapkan sistem pelaporan digital. Secara teoritis, penelitian ini menekankan perubahan yang terjadi antara praktik informal dan pelaporan formal, sehingga menambah jumlah penelitian sebelumnya tentang akuntabilitas di sektor publik. Hasil ini dapat digunakan oleh peneliti yang akan datang untuk mempelajari bagaimana keterbatasan pengungkapan berdampak pada kepercayaan pemangku kepentingan.

Kesimpulan

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Muna Barat telah diterapkan melalui penyampaian informasi yang memadai kepada masyarakat, pengungkapan biaya layanan, serta penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan. Keterbukaan ini membantu meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam hal aksesibilitas laporan keuangan serta detail proses penyusunan anggaran yang belum sepenuhnya terbuka untuk publik. RSUD perlu mempublikasikan informasi keuangan secara terbuka dan mudah diakses, misalnya melalui website resmi atau papan informasi di rumah sakit untuk memastikan transparansi yang lebih baik; perlu dibentuk mekanisme umpan balik atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan keuangan dan kinerja anggaran sehingga tercipta pengawasan partisipatif. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai proses internal penyusunan anggaran, termasuk peran bendahara dan operator, untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan bersifat transparan dan akuntabel.

Daftar Referensi

- Ekawaty, D., Mangindara, M., Ngkolu, N. W., Nurhadi, M., & Zulkartini, I. (2022). Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Tahun 2022. *Patria Artha Journal of Nursing Science*, 6(2), 111–124.
- Hidayat, M. S., Wardhaningrum, O. A., & Andriana, A. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat Di Masa Pandemi Covid-19. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 56–61.
- Kusumaningtyas, P. V., Rizki, N., & Sukma, P. (2023). Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Situs Web. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 106–118.
- Maulana, Z., & Lubis, N. K. (2020). Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4(1), 1–14.
- Mulyati, N. S., Faridah, E., & Prawiranegara, B. %J A. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Akuntapedia*, 1(1).
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17.
- Ningsih, S., Andriyani, F., & Cahyono, S. %J J. I. E. B. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 28(3), 315–333.
- Sagala, R. (2020). Transparansi Laporan Keuangan Sebagai Media Komunikasi Dan Informasi Bank Papua Dalam Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 4(2), 75–97.
- Sulfiani, A. N. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116.
- Syahza, A. (2016). *Metodologi Penelitian* (Edisi Revi). Pekanbaru: UR Press.
- Tompo, M., Madani, M., & Fatmawati. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 43–52.
- Trisnani, E. D., Dimiyati, M., & Paramu, H. %J B. J. B. D. M. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap, 11(3), 271–282.
- Wongkar, F. V., Saprudin, Masiaga, N., Abdullah, J., & Hippy, M. N. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 580–584.